BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 274 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Bapperida yang selanjutnya disebut Renstra Bapperida adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Bapperida yang selanjutnya disebut Renja Bapperida adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA BAPPERIDA

Pasal 2

Dokumen Renstra Bapperida merupakan dokumen perencanaan strategis Bapperida untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Bapperida yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Bapperida bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Bapperida dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Bapperida agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Bapperida;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Bapperida;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Bapperida.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA BAPPERIDA

Pasal 4

(1) Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Bapperida dalam menyusun Renja Bapperida.

(2) Renstra Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Bapperida paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Bapperida; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Bapperida.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029;
   2. strategi Bapperida dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Bapperida dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Bapperida; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA BAPPERIDA

Pasal 5

(1) Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Bapperida dan evaluasi hasil Renstra Bapperida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bapperida terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Bapperida.

(3) Kepala Bapperida menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Bapperida.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA BAPPERIDA

Pasal 6

Perubahan Renstra Bapperida dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Bapperida mempedomani perubahan RPJMD;

b. perubahan Renstra Bapperida dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Bapperida, maka Renstra Bapperida dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Bapperida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Bapperida terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Bapperida.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 274

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 274 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah yang didukung oleh tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Perencanaan Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan dokumen Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Pasal 13 menerangkan bahwa Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Secara spesifik sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan urusan pemerintahan riset dan inovasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka disusun Renstra untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang disusun juga untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif serta memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Seiring dengan hal tersebut penyusunan dokumen Renstra Bapperida Kabupaten Bandung untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2021-2026, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Renstra Bapperida Kabupaten Bandung yang disusun ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Bapperida dalam mencapai sasaran kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah melalui optimalisasi kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Bapperida adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Bapperida beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bapperida secara konsisten, sinergis dan akuntabel yang selanjutnya diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Bandung;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja;

   Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Bandung yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bapperida, Kinerja Pelayanan Bapperida, Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan dan Isu Strategis Bapperida

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bapperida serta Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif, serta Target IKU, IKK Bapperida juga indikator dan target pelaksanaan TPB

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kedudukan Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat Bapperida Kabupaten Bandung, merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, hal ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah.

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

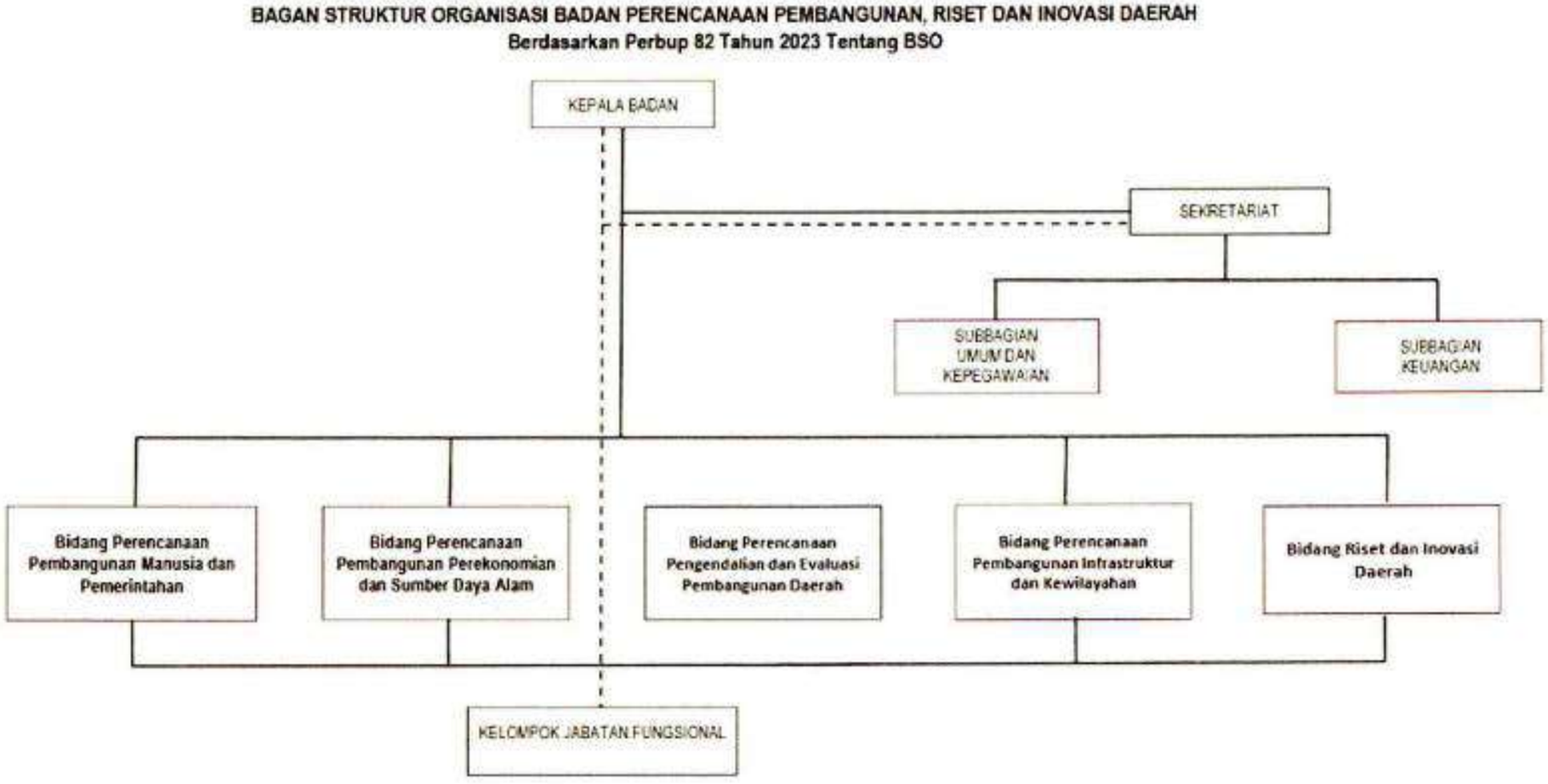
Selanjutnya, tugas dan fungsi pada Bapperida Kabupaten Bandung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Tugas pokok Bapperida adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Bapperida Kabupaten Bandung menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis pada urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;

Adapun susunan organisasi Bapperida Kabupaten adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bapperida



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang BSO

Berikut merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan:

1. Kepala Badan

   Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Kepala Badan membawahi:

   a. Sekretariat;
   b. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (PPMP);
   c. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA);
   d. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil);
   e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD);
   f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

2. Sekretaris

   Sekretaris memiliki tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Sekretaris membawahkan/mengkoordinasikan:

   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Perencana;
   d. Pelaksana.

3. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (PPMP)

   Kepala Bidang PPMP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan. Kepala Bidang PPMP memiliki fungsi:

   a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, meliputi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;
   b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan, meliputi Penyusunan Perencanaan,

Pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan.

Kepala Bidang PPMP membawahkan:

a. Perencana;

b. Pelaksana.

4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA)

Kepala Bidang PSDA mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang PSDA memiliki fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Kepala Bidang PSDA membawahkan:

a. Perencana;

b. Pelaksana.

5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil)

Kepala Bidang Infraswil mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Infraswil memiliki fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, meliputi Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.
e. Kepala Bidang Infraswil membawahkan:

Kepala Bidang Infraswil membawahkan:

a. Perencana;
b. Pelaksana.

6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD)

Kepala Bidang PPEPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang PPEPD memiliki fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan data informasi pembangunan daerah;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan data informasi pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Kepala Bidang PPEPD membawahkan:

a. Perencana;
b. Pelaksana.

7. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah (Rida)

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengembangan riset dan inovasi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang RIDA memiliki fungsi:

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan riset dan inovasi daerah;
b. pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan riset dan inovasi daerah;
c. pelaksanaan fasilitasi pendanaan, dan pengembangan riset dan inovasi daerah;
d. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual;
e. pelaksanaan perizinan riset dan pelaksanaan repositori ilmiah;
f. pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah;
g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi; dan
i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi membawahkan:

a. Analis Kebijakan;
b. Pelaksana.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan. Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah Tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan

beban kerja. Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan administratif kelompok jabatan fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan. Hasil pelaksanaan tugas jabatan fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Badan.

2.1.2 Sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Sumber daya yang ada di Bapperida Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

Sumber daya manusia (SDM) adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Berikut ini merupakan gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Bapperida Kabupaten Bandung.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bapperida Kabupaten Bandung terdiri dari: 1 (satu) orang Eselon II; 6 (orang) Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang, serta 2 (dua) orang Eselon IV. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025 didukung oleh 25 (dua puluh lima) orang Fungsional Perencana, 4 (empat) orang Fungsional Analis Kebijakan, 21 (dua puluh satu) orang Fungsional Umum serta 22 (dua puluh dua) orang Tenaga Kontrak. Berikut ini merupakan komposisi pegawai Bapperida berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat golongan dan jenis kelamin:

Tabel 2.1 Jumlah ASN Bapperida Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan/Pangkat dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan Terakhir								Golongan/Pangkat				Grade			Jenis Kelamin		Total
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3	I	II	III	IV	V	VII	IX	Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II							1					1				1		1
2	Eselon III							4	1			2	4				4	2	6
3	Eselon IV						1	1				2					1	1	2
4	Non Eselon		1		5		12	2	1		2	15	1	2	1		15	6	21
5	Fungsional						21	8				16	6			7	17	12	29
Jumlah		0	1	0	5	0	34	16	2	0	2	35	12	2	1	7	38	21	59

Sumber : Kepegawaian Bapperida Bulan Agustus 2025

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa ASN Bapperida Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar didominasi pada jenjang pendidikan terakhir S1 sebanyak 34 orang yang berimplikasi pada pegawai dengan golongan/pangkat III yang lebih banyak. Jika dilihat dari sebaran pendidikan terakhir jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 16 orang dan S3 sebanyak 2 orang hal ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya aparatur Bapperida memiliki kualitas yang baik.

Bapperida Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) dengan luas sebesar 1.480 m2, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 11 unit dan roda 2 sebanyak 16 unit, saluran telepon sebanyak 1 *line*, fasilitas komputer terdiri dari 28 unit laptop, 20 unit komputer PC dan 8 unit komputer tablet dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern Bapperida maupun untuk dapat diakses instansi lainnya dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Bapperida memiliki ruang rapat yang representatif dengan kapasitas ± 100 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas perangkat audio visual dan proyektor yang baik. Di lantai 2 pun disediakan 2 (dua) ruang rapat biasa dengan meja kursi yang memadai. Sarana lainnya yaitu tersedia mushola untuk beribadah dengan (empat) kamar mandi dan 2 (dua) kamar mandi di lantai 2 dalam keadaan baik dan nyaman. Berikut ini merupakan rincian aset yang dimiliki oleh Bapperida Kabupaten Bandung:

Tabel 2.2 Hasil Rekonsiliasi Aset Bapperida s/d Semester I Tahun 2025

No	Jenis Aset	Saldo Akhir Per 30 Juni 2025	Akumulasi Penyusutan s/d 30 Juni 2025	Nilai Buku Per 30 Juni 2025
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	8.023.469.088,00	6.284.569.715,00	1.738.899.373,00
3	Gedung dan bangunan	6.105.256.511,00	1.731.658.121,00	4.373.598.390,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset tetap lainnya	2.532.825.150,00	-	2.532.825.150,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan			
Total Aset Tetap		16.661.550.749,00	8.016.227.836,00	8.645.322.913,00
7	Aset Tak Berwujud	-	-	-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	145.088.717,00	145.088.717,00	-
9	Aset Yang Dimanfaatkan oleh Pihak Lain	-	-	-
Total Aset Lainnya		145.088.717,00	145.088.717,00	-
Total Aset Tetap dan Aset Lainnya		16.806.639.466,00	8.161.316.553,00	8.645.322.913,00

Sumber : Pengolahan Data Bapperida 2025

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Bandung merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja

ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai dengan Lampiran II Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan pengukuran kinerja bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Berikut merupakan indikator kinerja utama (IKU) Bapperida Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.3.1 Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya Bapperida Kabupaten Bandung memiliki tugas pokok dalam perumusan, pengendalian, pengkoordinasian, dan pertanggungjawaban kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan penelitian pengembangan. Dalam pelaksanaan tugasnya khususnya dalam urusan penelitian dan pengembangan, Bapperida Kabupaten Bandung telah melaksanakan kajian dan juga menginventarisir kajian-kajian yang dilakukan baik oleh personal ataupun instansi di Kabupaten Bandung serta dijurnalkan dalam berbagai tema dalam suatu wadah yaitu *Bapperida Journal Research* (BAJURI). Seluruh kajian akan menjadi referensi pembuatan kebijakan oleh dinas terkait. Jurnal ini diharapkan dapat mengembangkan potensi yang telah dikaji menjadi kebijakan yang tepat dan bermanfaat.

Berikut ini merupakan kajian-kajian yang diinventarisir dan telah masuk pada BAJURI Vol 1 Tahun 2025:

a. Analisis Implementasi Program Merdeka Belajar;
b. Analisis Kelembagaan Rantai Nilai Komoditas Kopi;
c. Analisis Penyebab Golput dalam Pilkada DKI Tahun 2024;
d. Instagram dalam Dinamika Kampanye Pilkada Subang;
e. Pemetaan Populasi Kunci HIV AIDS.

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Bandung periode 2020-2024. Pada tahun 2020-2021, 5 (lima) indikator kinerja tersebut merupakan indikator pada Renstra Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yang merupakan tahun transisi pada renstra periode selanjutnya. Sedangkan mulai tahun 2022-2024 menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Bapperida Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis target dan realisasi capaian indikator kinerja dari tahun 2021 semua indikator telah melebihi target. Hal ini dikarenakan tahun 2021 merupakan tahun terakhir pada Renstra periode Tahun 2016-2021.

Jika dilihat secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada gap atau kesenjangan yang signifikan capaian pelayanan pada Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2022-2025. Namun terdapat penurunan capaian kinerja pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target pada tahun 2024-2026 yang ditetapkan pada Renstra Perubahan Bapperida Tahun 2021-206 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan realisasi tahun 2023. Namun secara realisasi telah mencapai target yang telah ditargetkan.

Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pelayanan Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025 dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor pendukung internal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan Bapperida Tahun 2021-2025 diantaranya yaitu:

a. komitmen dan sinergitas antar bidang di Bapperida Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen perencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu;
b. keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah dan telah tercantum dalam SIPD RI;

Kabupaten Bandung memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Selain fungsi penyelenggaraan perencanaan, Bapperida menjalankan fungsi lain diantaranya penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Bapperida merumuskan tujuan, sasaran, strategi kebijakan sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada dokumen Renstra Bapperida Tahun 2021-2026. Adapun evaluasi capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bapperida pada rentang tahun 2021-2024 serta target tahun 2025-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Bapperida Tahun 2021-2026

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	a. Nilai akuntabilitas kinerja BAPPEDA b. Persentase aset dalam kondisi baik	a. Poin b.Persen	a.81 b.94,5	a. 81 ,20 b. 98,66	a.81 ,40 b.98,68	a.84,5 b. 98,70	a.84,55 b. 100	N/A	a. 83 b. 96,30	a. 83,40 b. 87,16	a.84,1 b. 84,6	a. 84,5 b. 100	a. 102,46 b. 101,9	a. 102,71 b. 88,34	a. 103,31 b.85,73	a. 100 b.101,31
	- Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83,74 50,36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku - Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Persen	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
	Nilai AKIP Bapperida	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	2	2	3	2	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A		1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	N/A	N/A	2	1	2	2	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	N/A	N/A	2	1	2	2	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	N/A	N/A	2	1	2	2	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	N/A	N/A	2	1	2	2	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	N/A	1	1	2	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen laporan tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen laporan triwulanan yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen evaluasi renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu	Dokumen	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	N/A	N/A	N/A	N/A	1	86	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	Bulan	12	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	N/A	N/A	47	51	51	51	N/A	N/A	47	51	N/A	N/A	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	N/A	12	12	12	12	0	0	12	12	N/A	N/A	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu	Laporan	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	N/A	2	2	2	2	0	0	2	2	N/A	N/A	100	100
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	N/A	2	2	2	2	0	0	2	2	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	Laporan	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	0	N/A	12	24	12	12	0	0	12	24	N/A	N/A	100	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK	Laporan	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	N/A	1	1	1	1	0	0	1	1	N/A	N/A	100	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian SKP ASN di atas >=80%	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	Stel	79	73	N/A	N/A	N/A	N/A	79	73	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	N/A	N/A	1	1	1	0	N/A	N/A	1	N/A	N/A	100	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	N/A	1	1	1	1	0	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	N/A	1	1	1	1	0	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	N/A	1	2	1	1	0	N/A	1	2	N/A	N/A	100	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	40	10	70	70	70	40	40	10	70	100	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Persentase ketersediaan operasional perkantoran -Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Administrasi Umum Kantor															
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	Unit	21	20	N/A	N/A	N/A	N/A	21	20	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Jenis	63	60	N/A	N/A	N/A	N/A	63	60	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	Jenis	5	3	N/A	N/A	N/A	N/A	5	1	N/A	N/A	100	33,3	N/A	N/A
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah satuan bahan logistik kantor yang dibeli	Jenis	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	Jenis	15	15	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	Jenis	3	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	Box	250	200	N/A	N/A	N/A	N/A	215	255	N/A	N/A	86	127,5	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	N/A	N/A	12	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Hok	250	250	N/A	N/A	N/A	N/A	234	282	N/A	N/A	93,6	112,8	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	N/A	12	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100	100
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	Unit	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Jenis	3	1	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	Buah	4000	4000	N/A	N/A	N/A	N/A	4563	5056	N/A	N/A	114,08	126,40	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	N/A	N/A	12	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	12	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum (meliputi penyediaan jasa kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Harian Lepas (THL)	Bulan	12	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	12	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan aset kantor yang layak pakai	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit	34	19	N/A	N/A	N/A	N/A	34	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	N/A	N/A	24	24	24	N/A	N/A	N/A	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki	Unit	N/A	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	N/A	95	N/A	N/A
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A	N/A	20	20	20	20	N/A	N/A	20	20	N/A	N/A	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Paket	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Paket	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	1	N/A	1	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran b. Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu c. Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	Persen	a. 97 b. 100 c. 96,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100 b 100 c.99,97	N/A	N/A	N/A	a. 103,09 b. 100 c. 103,59	N/A	N/A	N/A
	Capaian nilai PPD	Persen	N/A	87,6	88,7	89,8	90,9	N/A	N/A	89,35	90,68	93,83	N/A	102,00	102,23	104,49
	a. Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD b. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 91 b. 91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan b. Persentase berita acara yang disahkan	Persen	N/A	N/A	a. 100 b. 100	a. 100 b. 100	a. 100 b. 100	a. 100 b. 100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	100	100	100	100
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Jumlah Dokumen Usulan DAK 2. Jumlah Dokumen Usulan Bantuan Keuangan Gubernur 3. Jumlah Dokumen Perda SPPD	Dokumen	3	2	N/A	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	N/A	N/A	1	1	3	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen hasil Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	N/A	N/A	1	1	2	1			1	1	N/A	N/A	100	100
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1			100	100	N/A	N/A
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	N/A	N/A	1	1	1	1			1	1	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen hasil penyelenggarsan Musrenbang RKPD 2. Jumlah dokumen hasil penyelenggarsan Musrenbang RPJMD	Dokumen	2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	N/A	N/A	1	1	2	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan , Dokumen RPJMD)	Dokumen	3	2	N/A	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	N/A	N/A	2	1	3	2	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	100
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan	Persen	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanakan di perencanaan pembangunan daerah	Persen	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Analisa Pembangunan - Jumlah Dokumen E-Database SIPD Kabupaten Bandung	Dokumen	2	1	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	N/A	N/A	3	3	3	N/A	N/A	N/A	3	3	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Jumlah Dokumen Prosiding Satu Data Kabupaten Bandung (SDKB) - Jumlah Updating Aplikasi Perencanaan	- Dokumen -Aplikasi	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	N/A	N/A	68	68	68	68	N/A	N/A	68	68	N/A	N/A	100	100
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Profil Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan kewilayahan - Jumlah Video dan Buku Saku Profil Data Perencanaan Pembangunan - Jumlah dokumen Prosiding	Dokumen	2	3	N/A	N/A	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Pendampingan Aplikasi SIPD															
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	N/A	N/A	1	3	1	2	N/A	N/A	1	3	N/A	N/A	100	100
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	Persen	95	95,2	95,4	95,6	95,8	96,3	100	98,46	95,4	100	105,2632	103,4244	100	104,6025
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Jumlah dokumen pelaporan capaian pembangunan	Dokumen	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	N/A	N/A	1	1	2	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Laporan/dokumen SIPD yang dilaksanakan	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota	Dokumen	N/A	N/A	1	1	1	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran b. Persentase ketercapaian indikator kinerja program	Pesen	a. 97 b. 83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100 b. 83	N/A	N/A	N/A	a. 103,09 b. 100	N/A	N/A	N/A
	a. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD c. Persentase muatan RKA dengan RKPD	Pesen	N/A	a. 97,20 b. 97,20 c. 97,20	a. 97,40 b. 97,40 c. 97,40	a. 97,60 b. 97,60 c. 97,60	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	N/A	a. 99,58 b. 99,74 c. 99,74	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	a. 102,45 b. 102,61 c. 102,61	a. 102,67 b.102,67 c. 102,67	a. 102,46 b. 102,46 c. 102,46

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 3.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Pesen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	a. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia b. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Pesen	a. 99 b. 74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100 b. 100	N/A	N/A	N/A	a. 101,01 b. 135,14	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	a. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia c. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pesen	N/A	a. 97,20 b. 97,20 c. 97,20	a. 97,40 b. 97,40 c. 97,40	a. 97,60 b. 97,60 c. 97,60	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	N/A	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	a. 102,88 b. 102,88 c. 102,88	a. 102,67 b. 102,67 c. 102,67	a. 102,46 b. 102,46 c.102,46
	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pesen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	#VALUE!	#VALUE!
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	N/A	N/A	1	1	2	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	38	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Leporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	N/A	N/A	1	1	38	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	N/A	N/A	1	1	2	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	11	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	11	1	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	a. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang perekonomian dan SDA b. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang perekonomian dan SDA	Persen	a. 94 b. 75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 94 b. 75	N/A	N/A	N/A	a. 100 b. 100	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	a. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA c. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA	Persen	N/A	a. 97,20 b. 97,20 c. 97,20	a. 97,40 b. 97,40 c. 97,40	a. 97,60 b. 97,60 c. 97,60	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	N/A	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	a. 102,88 b. 102,88 c. 102,88	a. 102,67 b. 102,67 c. 102,67	a. 102,46 b. 102,46 c.102,46
	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	N/A	N/A	1	1	2	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Dokumen	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil sinergitas perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA	Dokumen	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	N/A	N/A	1	1	2	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA	Dokumen	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang SDA	Dokumen	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	a. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan b. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	a. 99 b. 83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 100 b. 83	N/A	N/A	N/A	a. 101,01 b. 100	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	a. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan c. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD Lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	N/A	a. 97,20 b. 97,20 c. 97,20	a. 97,40 b. 97,40 c. 97,40	a. 97,60 b. 97,60 c. 97,60	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	N/A	a. 98,75 b. 99,21 c. 99,21	a. 100 b. 100 c. 100	a. 100 b. 100 c. 100	N/A	a. 101,59 b. 102,07 c. 102,07	a. 102,67 b. 102,67 c. 102,67	a. 102,46 b. 102,46 c. 102,46
	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Infraswil dan Kewilayahan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	N/A	N/A	1	1	2	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	N/A	N/A	1	1	2	2	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	Dokumen	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	100	100
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	8	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil kajian/penelitian untuk penunjang perencanaan	Persen	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
	a. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan b. Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan	Persen	N/A	a. 30 b. 30	a. 40 b. 40	a. 50 b. 50	a. 66,5 b. 66,5	N/A	N/A	a. 100 b. 75	a. 50 b. 41,8	a. 66,13 b. 66,13	N/A	N/A	N/A	N/A
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	dokumen	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan	Persen	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	pemerintahan dan pengkajian peraturan															
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	100	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Persen	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	100	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase ketersediaan dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Persen	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	1	1	1	1	N/A	1	1	1	1	100	100	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100	100
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	1	1	100	100	100	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	Persen	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase ketersediaan dokumen inovasi dan teknologi	Persen	N/A	100	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	100	N/A	100	100	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen inovasi daerah	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	1	1	1	N/A	100	100	100
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	100

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	a. Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan b. Persentase Riset yang tersedia dalam dokumen Perencanaan c. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Inmendagri No, 2 Tahun 2025)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	a. 28,85 b. 75 c. 100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah riset yang masuk dalam dokumen Perencanaan	Riset	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi aktif yang tervcrifikasi dalam sistem Inovasi Daerah [SIDA] di Kabupaten Bandung	Inovasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	260	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Bimbingan teknis dan supervisi, kerjasama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Pelatihan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian	Indikator	Satuan	Target						Realisasi				Persentase			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Pengolahan Data Bapperida 2025

Tabel 2.7 Capaian Anggaran Bapperida Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw. I)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.591.590.290	17.331.150.408	15.678.198.206	18.911.460.844	23.555.757.323	14.903.166.989	16.339.930.559	14.624.605.533	17.916.066.062	4.678.148.952	89,82	94,28	93,28	94,74	19,86	1.392.833.407	2.045.003.607
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	426.245.204	399.388.000	4.815.000	78.230.000	283.447.980	401.580.602	370.167.022	4.622.900	76.289.500	52.339.000	94,21	92,68	96,01	97,52	18,47	-28.559.445	-69.648.320
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246.000.000	285.788.000	1.000.000	60.000.000	86.077.779	240.285.319	270.662.125	934.300	58.598.500	36.680.000	97,68	94,71	93,43	97,66	42,61	-31.984.444	-40.721.064
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	3.450.000	500.000	2.000.000	5.000.000	3.127.500	2.542.300	492.600	1.964.600	-	62,55	73,69	98,52	98,23	0,00	-	-625.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	3.450.000	500.000	2.500.000	5.000.000	3.678.400	1.454.400	494.500	2.430.900	-	73,57	42,16	98,90	97,24	0,00	-	-735.680
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	3.450.000	500.000	1.000.000	5.000.000,00	-	1.387.500	492.500	981.000	-	-	40,22	98,50	98,10	0,00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	3.450.000	500.000	1.000.000	3.258.801,00	1.951.091	628.750	498.000	992.000	-	39,02	18,22	99,60	99,20	0,00	-348.240	-390.218
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.149.904	24.800.000	815.000	4.000.000	20.962.000	64.815.542	22.641.000	769.800	3.857.500	-	96,52	91,29	94,45	96,44	0,00	-9.237.581	-12.963.108
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.095.300	75.000.000	1.000.000	7.730.000	59.122.400	87.722.750	70.850.947	941.200	7.465.000	465.000	94,23	94,47	94,12	96,57	0,79	-6.794.580	-17.451.550
Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	74.027.000	-	-	-	-	13.280.000	-	-	-	-	-	14.805.400	2.656.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	1.914.000	-	-	-	-	-	5.000.000	382.800

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.583.980.363	12.684.025.292	12.673.811.987	13.517.436.140	15.828.349.251	11.191.644.034	12.290.758.370	11.850.674.943	12.894.441.586	3.733.051.492	88,94	95,40	93,51	95,39	23,58	648.873.778	1.491.718.508
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.454.780.363	12.799.075.292	12.669.051.987	13.494.461.140	15.744.596.751	11.082.855.928	12.223.302.751	11.846.002.943	12.873.683.136	3.732.388.192	88,98	95,50	93,50	95,40	23,71	657.963.278	1.470.093.547
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	2.260.000	1.500.000	3.179.000	-	-	2.216.000	1.362.000	168.300	-	-	98,05	90,80	5,29	635.800	33.660
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.000.000	36.000.000	500.000	1.500.000	24.083.500	32.989.980	31.556.970	489.000	1.389.250	-	68,73	87,66	97,80	92,62	0,00	4.783.300	6.597.996
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	500.000	3.475.000	5.000.000	-	-	487.200	2.997.800	495.000	-	-	97,44	86,27	9,90	1.000.000	99.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.200.000	38.950.000	1.000.000	15.000.000	50.000.000	27.771.200	27.863.499	985.000	13.714.900	-	89,01	71,54	98,50	91,43	0,00	3.760.000	5.554.240
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50.000.000	10.000.000	500.000	1.500.000	1.490.000,00	48.026.926	8.035.150	494.800	1.294.500	-	96,05	80,35	98,96	86,30	0,00	9.702.000	9.605.385
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.275.000	4.350.000	10.000.000	-	-	2.074.400	357.600	-		-	-	-	-	2.000.000	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	975.000	2.350.000	5.000.000	-	-	904.000	0	0	-	-	92,72	0,00	0,00	1.000.000	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1.300.000	2.000.000	5.000.000,00	-	-	1.170.400	357.600	-	-	-	90,03	17,88	0,00	1.000.000	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.852.097	285.808.000	171.500.000	634.550.000	604.404.820	170.266.300	201.615.721	164.828.200	589.457.617	240.217.000	92,11	70,54	96,11	92,89	39,74	83.910.545	13.990.140
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110.750.000	40.000.000	2.275.000	43.050.000	31.500.000	101.675.000	37.496.875	-	40.792.500	-	91,81	93,74	0,00	94,76	0,00	-15.850.000	-20.335.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	-	-	2.000.000	5.000.000	-	-	2.178.200	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	650.000	35.500.000	5.000.000	-	-	594.000	24.981.500	597.000	-	-	91,38	70	12	1.000.000	119.400
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-		3.575.000	2.000.000	42.700.000			1.386.000	-	-	-	-	38,77	-	-	8.540.000	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.102.097	245.808.000	165.000.000	552.000.000	520.204.820	68.591.300	164.118.846	160.670.000	523.683.617	239.620.000	93	66,77	97,38	94,87	46,06	89.220.545	34.205.740
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.242.644.958	1.207.724.293	790.643.219	1.907.376.904	2.055.217.272	1.134.524.227	1.137.544.494	742.950.824	1.775.060.443	316.074.886	91,30	94,19	93,97	93,06	15,38	162.514.463	-163.689.868
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.000.000	20.000.000	23.949.500	28.100.000	50.000.000	38.000.000	14.397.007	22.590.000	28.099.200	18.996.575	100,00	71,99	94,32	100,00	37,99	2.400.000	-3.800.685
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	935.000.000	937.699.293	243.738.150	1.499.374.544	1.583.847.700	899.795.700	909.964.000	242.200.648	1.466.281.492	178.809.300	96,23	97,02	99,37	97,79	11,29	129.769.540	-144.197.280
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	10.000.000	473.800	3.000.000	112.552.300	59.807.000	2.994.250	430.000	2.990.000	19.960.000	99,68	29,94	90,76	99,67	17,73	10.510.460	-7.969.400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	29.999.400	93.250.000	65.000.000	19.973.183	19.958.200	29.413.700	57.362.100	13.562.800	99,87	99,79	98,05	61,51	20,87	9.000.000	-1.282.077
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.057.458	40.000.000	54.733.087	29.062.360	24.198.000	11.185.977	29.190.664	54.659.779	20.378.800	14.992.500	30,19	72,98	99,87	70,12	61,96	-2.571.892	761.305

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.945.000	30.000.000	163.667.000	31.590.000	35.000.000	9.197.700	12.469.606	133.003.800	9.450.600	1.816.500	84,04	41,57	81,26	29,92	5,19	4.811.000	-1.476.240
Fasilitasi Kunjungan Tamu	51.142.500	35.000.000	47.985.000	50.000.000	73.600.000	12.450.000	34.569.950	34.740.800	49.903.100	7.975.000	24,34	98,77	72,40	99,81	10,84	4.491.500	-895.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.500.000	114.825.000	226.097.282	173.000.000	111.019.272	84.114.667	114.000.817	225.912.097	140.595.151	59.962.211	92,94	99,28	99,92	81,27	54,01	4.103.854	-4.830.491
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000	180.000.000	31.282.500	12.758.800	1.582.038.000	58.350.000	178.699.000	31.044.000	12.750.000	-	97,25	99,28	99,24	99,93	0,00	304.407.600	-11.670.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	718.038.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.607.600	-
Pengadaan Mebel	60.000.000	180.000.000	31.282.500	12.758.800	864.000.000	58.350.000	178.699.000	31.044.000	12.750.000	-	97,25	99,28	99,24	99,93	-	160.800.000	-11.670.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.212.767.668	1.391.066.800	1.710.280.500	2.145.329.000	2.645.000.000	1.132.209.084	1.287.768.675	1.562.407.004	2.015.463.567	263.782.784	93,36	92,57	91,35	93,95	9,97	286.446.466	-173.685.260
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.000.000	30.000.000	500.000	3.600.000	5.000.000	16.059.300	17.855.200	426.200	527.800	312.000	59,48	59,52	85,24	14,66	6,24	-4.400.000	-3.149.460
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.247.668	130.260.000	206.660.500	205.774.000	305.000.000	79.335.299	100.549.364	158.644.000	146.367.577	43.658.284	71,96	77,19	76,77	71,13	14,31	38.950.466	-7.135.403
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.075.520.000	1.230.806.800	1.503.120.000	1.935.955.000	2.335.000.000	1.036.814.485	1.169.364.111	1.403.336.804	1.868.568.190	219.812.500	96,40	95,01	93,36	96,52	9,41	251.896.000	-163.400.397

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	881.100.000	983.138.023	293.590.000	611.430.000	547.300.000	814.592.742	873.377.277	266.003.262	552.245.749	72.683.790	92,45	88,84	90,60	90,32	13,28	-66.760.000	-148.381.790
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	201.350.000	200.000.000	104.140.000	106.670.000	97.300.000,00	151.917.492	122.977.504	77.354.682	48.312.549	11.359.290	75,45	61,49	74,28	45,29	11,67	-20.810.000	-28.111.640
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	47.000.000	48.380.000	59.760.000	150.000.000	-	16.211.773	47.998.580	59.172.600	61.324.500	-	34,49	99,21	99,02	40,88	30.000.000	12.264.900
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	389.750.000	736.138.023	141.070.000	195.000.000	100.000.000	386.450.000	734.188.000	-	194.850.000	-	99,15	99,74	0,00	99,92	0,00	-57.950.000	-77.290.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.000.000	-	-	-	-	276.225.250	-	-	249.910.600	-	95,25	-	-	-	-	-58.000.000	-55.245.050
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	250.000.000	200.000.000	-	-	140.650.000	-	-	-	-	-	0,00	0,00	40.000.000	-
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.977.839.623	2.331.906.500	2.065.912.791	3.304.094.144	2.764.803.000	2.669.929.754	2.283.684.254	1.939.389.255	3.171.168.771	560.362.369	89,66	97,10	94,84	95,98	20,27	-42.607.325	-421.913.477
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.775.525.630	1.371.288.500	1.277.109.617	2.163.069.000	1.707.446.600	1.508.339.702	1.340.598.192	1.194.951.011	2.096.873.068	342.308.569	84,95	97,76	93,57	96,94	20,05	-13.615.806	-233.206.227
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	177.792.750	347.812.500	179.976.000	568.008.400	377.070.400	157.600.372	339.693.600	179.842.080	564.510.910	99.442.009	88,64	97,67	99,93	99,38	26,37	39.855.530	-11.631.673

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	73.411.200	51.919.500	40.239.000	86.978.000	42.828.400	69.892.600	51.763.475	39.401.240	82.626.441	17.905.560	95,21	99,70	97,92	95,00	41,81	-6.116.560	-10.397.408
Pelaksanaan Konsultasi Publik	119.496.000	185.825.000	134.874.800	254.064.220	242.728.400	114.099.780	184.948.223	98.057.576	249.724.167	132.625.500	95,48	99,53	72,70	98,29	54,64	-24.646.480	-3.705.144
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	60.650.050	81.608.000	68.417.900	162.159.200	22.563.200	47.500.000	81.145.375	56.364.554	155.021.055	-	78,32	99,43	82,38	95,60	-	-7.617.370	-9.500.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	478.329.000	306.064.500	378.980.650	578.553.400	571.219.300	430.950.374	303.665.067	355.346.273	552.764.214	87.525.500	90,09	99,22	93,76	95,54	15,32	-18.578.060	-68.684.975
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	865.846.630	398.059.000	474.621.267	513.305.780	451.036.900	688.296.576	379.382.452	465.939.288	492.226.271	4.810.000	79,49	95,31	98,17	95,89	1,07	-82.961.946	-136.697.315
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	793.359.493	556.788.000	360.905.592	529.383.000	477.186.400	769.697.956	524.580.427	359.022.326	495.909.149	38.615.000	97,02	94,22	99,48	93,68	8,09	-63.234.619	-146.216.591
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	225.497.000	133.099.440	67.437.992	96.361.000	77.516.200	219.383.200	128.534.782	66.926.045	95.461.700	18.860.000	97,29	96,57	99,24	99,07	24,33	-29.596.160	-40.104.640
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	328.757.300	304.565.335	229.185.000	266.431.000	280.059.700	322.760.000	283.906.764	228.091.681	251.343.109	5.279.500	98,18	93,22	99,52	94,34	1,89	-9.739.520	-63.496.100
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	239.105.193	119.123.225	64.282.600	166.591.000	119.610.500	227.554.756	112.138.881	64.004.600	149.104.340	14.475.500	95,17	94,14	99,57	89,50	12,10	-23.898.939	-42.615.851
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	408.954.500	423.830.000	266.038.332	451.158.944	487.511.600	391.892.096	418.505.635	255.737.318	427.239.524	144.463.800	95,83	98,74	96,13	94,70	29,63	-15.711.420	-49.485.659

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	242.436.000	182.430.000	114.764.532	182.608.330	208.927.900	230.681.971	178.354.407	105.244.834	164.577.682	37.540.800	95,15	97,77	91,71	90,13	17,97	-6.701.620	-38.628.234
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	166.518.500	241.400.000	151.273.800	268.550.614	278.583.700	161.210.125	240.151.228	150.492.484	262.661.842	106.923.000	96,81	99,48	99,48	97,81	38,38	22.413.040	-10.857.425
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-	161.859.250	160.483.200	92.658.400	-	-	149.678.600	151.147.040	34.975.000	-	-	92,47	94,18	37,75	18.531.680	6.995.000
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	0	-	161.859.250	160.483.200	92.658.400	-	0	149678600	151.147.040	34.975.000	-	-	92,47	94,18	37,75	18.531.680	6.995.000
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.763.558.000	2.687.367.600	3.302.922.950	3.866.114.048	2.880.277.000	2.517.868.248	2.424.905.854	3.286.277.539	3.730.767.919	339.850.391	91,11	90,23	99,50	96,50	11,80	23.343.800	-435.603.571
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	811.500.000	714.500.000	428.839.750	907.852.000	945.084.900	604.335.936	634.557.158	427.873.867	882.008.916	98.395.386	74,47	88,81	99,77	97,15	10,41	26.716.980	-101.188.110
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.326.000	167.920.000	65.081.600	337.980.500	146.770.500	47.776.562	134.610.131	65.031.500	318.957.534	12.853.500	43,70	80,16	99,92	94,37	8,76	7.488.900	-6.984.612

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	108.500.000	93.966.000	64.067.000	60.832.400	61.316.000,00	103.890.165	83.967.281	63.866.700	60.700.499	6.961.000	95,75	89,36	99,69	99,78	11,35	-9.436.800	-19.385.833
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	77.500.000	97.500.000	67.914.500	43.311.300	165.287.100	51.830.981	89.738.195	67.473.982	43.049.830	9.637.000	66,88	92,04	99,35	99,40	5,83	17.557.420	-8.438.796
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	261.674.000	184.285.600	149.234.600	313.753.200	375.753.200	212.470.981	171.931.808	149.103.444	307.670.800	47.907.841	81,20	93,30	99,91	98,06	12,75	22.815.840	-32.912.628
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	132.000.000	97.966.000	47.781.350	88.702.300	82.301.100	86.840.991	87.480.085	47.763.345	88.393.053	15.330.000	65,79	89,30	99,96	99,65	18,63	-9.939.780	-14.302.198
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	122.500.000	72.862.400	34.760.700	63.272.300	113.657.000	101.526.256	66.829.658	34.634.896	63.237.200	5.706.045	82,88	91,72	99,64	99,94	5,02	-1.768.600	-19.164.042
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	910.000.000	822.486.400	395.438.050	974.593.400	986.090.700	880.925.912	750.523.796	387.479.292	956.094.692	114.634.385	96,81	91,25	97,99	98,10	11,63	15.218.140	-153.258.305

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw. I)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	218.000.000	109.000.000	96.883.600	229.535.000	240.712.000	205.288.916	108.957.152	93.339.785	221.552.515	28.481.940	94,17	99,96	96,34	96,52	11,83	4.542.400	35.361.395
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	310.000.000	192.059.000	78.623.400	156.319.000	62.463.000	298.081.695	167.012.505	78.459.273	156.220.400	14.005.920	96,16	86,96	99,79	99,94	22,42	49.507.400	56.815.155
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		129.993.200	60.651.400	130.501.200	109.293.715		113.990.606	60.579.517	128.953.268	17.819.295	-	87,69	99,88	98,81	16,30	21.858.743	3.563.859
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	382.000.000	118.800.000	-	-	-	377.555.301	110.009.012	-	-		98,84	92,60	-	-	-	76.400.000	75.511.060
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	125.941.000	55.425.750	222.378.000	202.376.000		123.227.121	55.038.850	221.565.509	11.500.400	-	97,85	99,30	99,63	5,68	40.475.200	2.300.080
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		146.693.200	40.884.300	111.504.000	146.333.700	-	127.327.400	40.656.698	104.151.000	21.076.330	-	86,80	99,44	93,41	14,40	29.266.740	4.215.266

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	62.969.600	124.356.200	224.912.285	-	-	59.405.169	123.652.000	21.750.500	-	-	94,34	99,43	9,67	44.982.457	4.350.100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.042.058.000	1.150.381.200	2.478.645.150	1.983.668.648	949.101.400	1.032.606.400	1.039.824.900	2.470.924.380	1.892.664.311	126.820.620	99,09	90,39	99,69	95,41	13,36	18.591.320	181.157.156
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	389.100.000	545.700.000	2.066.282.000	526.766.000	169.013.700	380.673.800	445.014.900	2.061.838.950	493.461.411	71.646.320	97,83	81,55	99,78	93,68	42,39	44.017.260	61.805.496
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	94.858.000	105.100.000	57.592.400	87.374.020	61.316.000	94.851.400	98.974.300	57.578.400	79.039.650	5.529.000	99,99	94,17	99,98	90,46	9,02	6.708.400	17.864.480
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	151.430.000	112.430.000	125.528.250	920.312.400	262.430.000	150.821.200	112.184.500	122.708.250	884.318.950	13.431.900	99,60	99,78	97,75	96,09	5,12	22.200.000	27.477.860
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	172.100.000	135.641.200	75.922.500	246.650.000	251.444.700	172.100.000	132.341.200	75.872.150	244.218.600	14.240.200	100,00	97,57	99,93	99,01	5,66	15.868.940	31.571.960

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	119.000.000	129000000	25872500	85.179.228	79.327.000	118.990.000	128.900.000	25.808.100	81.580.900	14.525.600	99,99	99,92	99,75	95,78	18,31	-7.934.600	-20.892.880
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	115.570.000	122.510.000	127.447.500	117.387.000	125.570.000	115.170.000	122.410.000	127.118.530	110.044.800	7.447.600	99,65	99,92	99,74	93,75	5,93	2.000.000	-21.544.480
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	981.541.000	1.497.500.000	2.021.176.142	2.815.313.500	2.592.000.200	943.551.206	1.468.891.969	2.015.403.867	2.796.071.659	173.576.462	96,13	98,09	99,71	99,32	6,70	322.091.840	-153.994.949
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	303.100.000	774.204.000	296.852.942	302.747.560	269.796.000	297.843.823	770.469.329	295.718.786	301.094.161	27.539.000	98,27	99,52	99,62	99,45	10,21	-6.660.800	-54.061.365
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	303.100.000	774.204.000	296.852.942	302.747.560	269.796.000,00	297.843.823	770.469.329	295.718.786	301.094.161	27.539.000	98,27	99,52	99,62	99,45	10,21	-6.660.800	-54.061.365
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	163.611.200	104.388.000	349.840.000	-	-	163.012.229	104.130.672	10.329.762	-	-	99,63	99,75	2,95	69.968.000	2.065.952
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	163.611.200	104.388.000	349.840.000	-	-	163.012.229	104.130.672	10.329.762	-	-	99,63	99,75	2,95	69.968.000	2.065.952
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	365.441.000	305.000.000	978.682.226	1.247.428.400	614.104.500	360.504.820	302.409.200	975.346.027	1.242.506.025	10.481.500	98,65	99,15	99,66	99,61	1,71	49.732.700	70.004.664
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	281.305.500	205.000.000	250.097.000	23.062.480	34.725.000	279.705.320	203.942.400	249.084.972	22.593.365	-	99,43	99,48	99,60	97,97	-	49.316.100	55.941.064
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	273.149.000	129.919.500	-	-	-	272.041.296	2.546.000	-	-	-	99,59	1,96	25.983.900	509.200
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	149.323.320	-	-	-	-	149.119.133	-	-	-	-	99,86	#DIV/0!	-	-
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	299.820.226	117.586.500	175.000.000	-	-	298.682.902	116.447.041	-	-	-	99,62	99,03	-	35.000.000	-

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	158.441.500	124.280.000	-	-	-	158.035.900	-	-	-	-	99,74	-	24.856.000	-
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	150.180.000	-	-	-	-	7.935.500	-	-	-	-	-	30.036.000	1.587.100
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			89.509.000	282095600	0	-	-	89.143.731	281.063.490	0	-	-	99,59	99,63	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan					0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	84.135.500	100.000.000	339.256.000	243770000	0	80.799.500	98.466.800	338.434.422	243.205.800	0	96,03	98,47	99,76	99,77	-	-16.827.100	-16.159.900
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	313.000.000	418.296.000	582.029.774	1.160.749.540	1358259700	285.200.563	396.013.440	581.326.825	1.148.340.801	125.226.200	91,12	94,67	99,88	98,93	9,22	209.051.940	-31.994.873
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	313.000.000	418.296.000	582.029.774	392.000.000	950000000	285.200.563	396.013.440	581325682 5	391.719.296	87.614.400	91,12	94,67	99,88	99,93	9,22	127.400.000	-39.517.233

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (Tw.1)	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				410.040.000		0	0		398.101.000	-	-	-	-	97,09	-	-	-
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				358.709.540	408259700	0	0		358.520.505	37.611.800	-	-	-	99,95	9,21	81.651.940	7.522.360
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						0	0									-	-
	23.314.528.913	23.867.924.508	23.068.210.089	28.896.982.536	31.792.837.523	21.034.516.197	22.517.412.636	21.885.676.194	27.614.074.411	5.751.938.174	90,22	94,34	94,87	95,56	18,09	1.695.661.722	3.056.515.605

Sumber : Pengolahan Data Bapperida 2025

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah mencakup semua kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah, yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan schingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Bandung, maka kelompok sasaran layanan Bapperida terdiri dari berbagai pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Pelayanan yang diberikan oleh Bapperida berupa penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, fasilitasi musyawarah perencanaan, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta pengendalian dan evaluasi program pembangunan pada setiap urusan pemerintahan. Kelompok sasaran layanan Bapperida Kabupaten Bandung adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung dan masyarakat.

2.1.5 Mitra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra pelayanan Bapperida Kabupaten Bandung adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bapperida dalam merencanakan,

melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan daerah. Mitra pelayanan ini terbagi ke dalam beberapa kategori diantaranya:

a. Perangkat Daerah sesuai dengan mitra Bidang Perencana;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Legislatif) sebagai mitra dalam pembahasan dan pengesahan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta memberikan aspirasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan;
c. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Teknis lainnya dalam hal memberikan arah kebijakan nasional, sinkronisasi program pusat-daerah, serta dukungan dana dan teknis;
d. Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagai mitra yang terlibat langsung dalam perencanaan partisipatif dan menyampaikan kebutuhan masyarakat;
e. Sektor Swasta dan Dunia Usaha sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi daerah melalui investasi dan kemitraan publik-swasta;
f. Akademisi dan Peneliti sebagai mitra dalam menyediakan riset dan kajian ilmiah, data dan analisis sebagai dasar perencanaan;
g. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah (NGO) berperan dalam advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi independen;
h. Masyarakat dan Kelompok Komunitas; berperan dalam sumber aspirasi dan partisipasi dalam penyusunan prioritas pembangunan serta terlibat dalam forum-forum perencanaan seperti Musrenbang, Konsultasi Publik, dan survei kepuasan layanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Dacrah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, Bapperida Kabupaten Bandung perlu menghadapi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan yang relevan, seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029. Telaahan ini akan mencakup juga analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan

dengan urusan perencanaan serta riset dan inovasi. Selain itu, akan dibahas potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah dan isu-isu terkait yang harus diatasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja Bapperida Kabupaten Bandung.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Tahap pertama merupakan perkuatan fondasi transformasi. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045.

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah isu prioritas dalam RPJMN 2025-2029. Isu-isu ini disusun untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan. Dalam pelaksanaannya, RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan daerah. Dalam konteks ini, sinergi antara perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial untuk menjadi acuan yang jelas bagi pelaku pembangunan di pusat dan daerah.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan langkah penguatan pada tata kelola pembangunan terutama aspek pengendalian pembangunan secara terpadu untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Hal ini dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional. Dalam hal ini Bapperida Kabupaten Bandung sebagai *leading* sektor dalam urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan telah

menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung dengan menyelaraskan arah, kebijakan serta pemetaan program kegiatan yang mendukung dalam terwujudnya Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam delapan Asta Cita.

2.2.2 Review Renstra Bappenas dan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

A. Review Renstra Bappenas

Telaahan Kementerian atau Lembaga terkait merupakan cara untuk melaksanakan proses keselarasan perencanaan antara tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Bandung dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI. Penelaahan ini terutama dilakukan untuk mengetahui tujuan, sasaran dan indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas RI merupakan Badan yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2020-2024 menetapkan Visi Kementerian PPN/Bappenas RI 2020-2024 yaitu: "Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas dan Kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, serta
2. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas RI di tahun 2020-2024, terdapat 3 (tiga) tujuan

dengan 4 (empat) sasaran strategis yang telah dirumuskan sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8 Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenas

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator
Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	SS-1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi
		SS-2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	SS-3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan
Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien	Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	SS-4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI, Bapperida Kabupaten Bandung telah menyelaraskannya dengan tujuan dan sasaran Renstra Bapperida sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas RI dengan Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Renstra Kementerian PPN/ Bappenas RI Tahun 2020-2024			Renstra Bapperida KAB. BANDUNG Tahun 2025-2029		
Tujuan	Sasaran Strategis		Tujuan	Sasaran Strategis	
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia	SS-1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan	SS-1	Peningkatan tata kelola organisasi
	SS-2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional		SS-2	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
				SS-3	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	SS-3	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner		-	-
Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	SS-4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		-	-

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

Berdasarkan Tabel di atas, bahwa sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2020 – 2024. Adapun untuk sasaran "Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM" dijabarkan oleh Bapperida Kabupaten Bandung pada level *Intermediate Outcome* (indikator program) sedangkan sasaran "Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner" merupakan peran Kementerian PPN/Bappenas RI sebagai unsur pemerintah pusat. Sedangkan untuk sasaran "Meningkatnya kualitas dan keterpaduan hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah" tidak bisa dibandingkan dengan sasaran kinerja pada Kementerian PPN/ Bappenas dikarenakan tidak memiliki fungsi riset dan inovasi.

B. Review Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), bahwa penentuan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran Renstra ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.10 Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	SS-1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat yang bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi.
		SS-2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Jawa Barat yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi.

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bapperida Kabupaten Bandung telah menyelaraskannya dengan tujuan dan sasaran Renstra Bapperida sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026			Renstra Bapperida KAB. BANDUNG Tahun 2025-2029		
Tujuan	Sasaran Strategis		Tujuan	Sasaran Strategis	
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	SS-1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat yang bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan	SS-1	Peningkatan tata kelola organisasi
	SS-2	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Jawa Barat yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan		SS-2	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026			Renstra Bapperida KAB. BANDUNG Tahun 2025-2029		
Tujuan	Sasaran Strategis		Tujuan	Sasaran Strategis	
		pembangunan daerah			
				SS-3	Meningkatnya kualitas dan keterpaduan hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

Berdasarkan Tabel di atas, bahwa sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat. Adapun untuk sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat yang bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan" dan "Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Jawa Barat yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah" dijabarkan oleh Bapperida Kabupaten Bandung pada sasaran strategis "Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah" serta sasaran strategis "Peningkatan tata kelola organisasi" untuk urusan penunjang pemerintahan. Sedangkan untuk sasaran "Meningkatnya kualitas dan keterpaduan hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah" tidak bisa dibandingkan dengan sasaran kinerja pada Bappeda Provinsi Jawa Barat dikarenakan tidak memiliki fungsi riset dan inovasi.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapperida Kabupaten Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Bandung adalah "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam hal ini, Bapperida Kabupaten Bandung berada dalam misi ke tiga yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel", dengan tujuan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", indikator kinerja utama "Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan sasaran "Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien", dan indikator sasaran "Indeks Reformasi Birokrasi". Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:

Gambar 2.2 *Cascading* Misi Pembangunan 3



Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Untuk dapat mendukung capaian dari *cascading* kinerja pada misi tiga tersebut maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang diampu oleh Bapperida Kabupaten Bandung dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada urusan perencanaan adalah "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah" sedangkan dalam urusan Penelitian dan Pengembangan adalah "Persentase Kebijakan Berbasis Bukti". Pencapaian IKD tersebut didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Bapperida Kabupaten Bandung.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Salah satu tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Bandung diantaranya adalah penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan perencanaan, Bapperida Kabupaten Bandung memiliki tugas untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Dalam hal ini Bapperida Kabupaten Bandung menyusun dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pendanaan pembangunan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pada proses perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan lainnya, dalam hal ini yaitu RTRW, sebagai dokumen perencanaan tata ruang yang memuat penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, yang dilaksanakan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah, dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Bandung dalam menjaga keselarasan perencanaan pembangunan daerah, menjadi kunci utama tercapainya sinergi perencanaan pembangunan yang bersifat spasial maupun aspasial. Dalam hal ini, Bapperida Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab untuk memastikan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Bandung. Perencanaan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan perwujudan RTRW yang memiliki fungsi matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sehingga tidak terlepas dari konteks penataan ruang yang secara komprehensif mengintegrasikan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat kewenangan, serta diperkuat dengan muatan daya dukung lingkungan, informasi kawasan rawan bencana, dan arahan zonasi dalam pengembangan/ pembangunan kawasan.

Hal yang menjadi pedoman dalam sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan RTRW berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 bahwa penataan ruang Kabupaten Bandung diarahkan untuk menciptakan kawasan yang kompetitif, layak huni, dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjawab isu-isu strategis di tingkat regional.

Struktur ruang Kabupaten Bandung dirancang untuk menciptakan tata kelola wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan, mencakup sistem

pusat permukiman dan jaringan prasarana yang mendukung perkembangan fisik, ekonomi, dan sosial. Dalam perencanaannya, pola ruang Kabupaten Bandung terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan wilayah secara terpadu. Selain itu pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Bandung merupakan upaya penataan ruang yang diarahkan untuk mendorong pemanfaatan ruang yang memiliki nilai strategis tinggi, baik dari aspek ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, maupun pertahanan dan keamanan.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Bapperida Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada proses perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah diperlukan juga sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan lainnya, yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Bapperida Kabupaten Bandung dalam hal ini bertugas untuk mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan dokumen (RPPLH) yang ada.

Dalam pelaksanaannya, proses sinkronisasi antara kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan RPPLH selanjutnya diselenggarakan melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu kajian untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan. Dalam hal ini, KLHS menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan RPJM adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu Capaian Program TPB ruang (*self assessment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif. KLHS juga berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, KLHS tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target SDGs.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJPD dan RPJMD, wajib disertai dengan penyusunan KLHS. Dalam hal ini, dokumen KLHS menjadi salah satu kelengkapan dokumen yang harus disampaikan pada proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang dilaksanakan oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri. Dengan kata lain KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pengkajian teknis dilaksanakan melalui analisis terhadap muatan sebagai berikut:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup,
3. kinerja layanan/jasa ekosistem,
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Adapun untuk pengkajian pembangunan berkelanjutan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pengkajian pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data mencakup kondisi umum daerah, capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) yang relevan, dan pembagian peran antara berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari pengkajian pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam merumuskan isu dan skenario pembangunan berkelanjutan, serta menghasilkan rekomendasi alternatif pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi alternatif pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan selanjutnya digunakan dalam menyusun Rancangan Awal RPJPD dan RPJMD, yaitu dalam penyusunan gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan, dan sasaran strategis daerah. Berkaitan dengan isu strategis daerah, hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam menentukan isu-isu yang paling strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan.

2.2.6 Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi Bapperida dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pelayanannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas perencanaan pembangunan masih perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti dengan implementasi yang berkesinambungan untuk mencapai	Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan (capaian IPPD)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	tujuan dan sasaran pembangunan		Belum maksimalnya penerapan konsep tematik,holistik, integratif dan spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan
			Timeline proses perencanaan pembangunan daerah dan pusat belum sepenuhnya selaras
			Belum meratanya beban kerja dengan kompetensi perencana
			Perubahan regulasi proses perencanaan dan penganggaran di daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan data informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan	Belum optimalnya penerapan kebijakan satu data sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan
			Belum ada SDM yang secara khusus diberi ketugasan di bidang statistik dan pengelolaan data (SDM fungsional)
			Data sektoral yang dimiliki oleh PD Walidata belum sesuai dengan yang dibutuhkan PD dalam penyusunan perencanaan pembangunan
			Belum tersedianya wadah data untuk berbagi pakai
		Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif	Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta yang berdampak pada perbaikan kinerja pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum terwujudnya simplifikasi dalam penyampaian pelaporan kinerja sehubungan dengan banyaknya aplikasi monev yang belum terintegrasi
			Peraturan tentang pelaporan dengan berbagai macam format yang berbeda
			Penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat
			Masih terbatasnya kapasitas dan kapabilitas kompetensi SDM perencana
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Masih terbatasnya pemanfaatan hasil riset dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
			Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan riset dan inovasi untuk kebutuhan perencanaan pembangunan
			Belum terinventarisir dan terpublikasikannya seluruh hasil riset yang dilaksanakan
			Riset yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan berkaitan langsung untuk menjawab permasalahan pembangunan
			Belum adanya SDM fungsional rumpun kelitbangan
			Belum terlaksananya seluruh fungsi riset dan inovasi daerah

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

2.2.7 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Oleh karena itu analisis isu-isu strategis merupakan langkah awal dalam perencanaan daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Bapperida Kabupaten Bandung yaitu:

1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Optimalisasi pemanfaatan data dan penggunaan data yang akurat dan akuntabel;
3. Pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif;
4. Optimalisasi pemanfaatan data dan hasil riset dan inovasi.

Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Tahun 2024 telah mencapai 85,57%	Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Disupsi Teknologi	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan data informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Disupsi Teknologi	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pemanfaatan data dan penggunaan data yang akurat dan akuntabel
	Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan	Disupsi Teknologi	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		program antar OPD				
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Disupsi Teknologi	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi pemanfaatan data dan hasil riset dan inovasi

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan menengah Bapperida Kabupaten Bandung merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun serta memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih. Tujuan ini dilengkapi dengan indikator sebagai alat ukur untuk mengetahui keberhasilan pada akhir perencanaan.

Dalam renstra periode Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Bandung berada dalam misi ke-tiga yaitu Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Untuk dapat mewujudkan misi tersebut khususnya sasaran "Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel efektif dan efisien", maka harus ditunjang dengan tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikator yang mendukung dalam pencapaian tersebut.

Berdasarkan integrasi penurunan visi dan misi Bupati Terpilih tersebut dirumuskan tujuan jangka menengah Bapperida Kabupaten Bandung yaitu "Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan" dengan indikator tujuannya yaitu "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)".

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan spesifik untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan sasaran ini dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, kelompok sasaran yang dilayani dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.1.2 Sasaran

Pencapaian Tujuan dari Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, dijabarkan melalui rumusan Sasaran Strategis yang disertai dengan Indikator Sasaran yang selanjutnya akan menjadi ukuran

pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Bandung, untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran Strategis 1

   Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten. Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu:

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;
b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*); dan
c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

2. Sasaran Strategis 2

   Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan indikator sasaran: persentase hasil riset yang masuk dalam jurnal terakreditasi dan persentase produk inovasi yang dimanfaatkan.

   Hasil riset yang dihitung merupakan hasil riset yang masuk ke dalam jurnal yang telah terakreditasi seperti Sinta, Scopus, dan lain lain. Sedangkan untuk produk inovasi yang berada dalam jaringan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) telah diinput dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) Kemendagri.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Terwujudnya sistem birokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	76.71%	79.00%	83.20%	85.70%	88.00%	91.00%	93.50 %	IPPD Komponen versi 2023 berdasarkan aturan Bappenas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perhitungan IPPN dengan Definisi Operasional : (Komponen Sinergi) + (Komponen Kualitas Perencanaan) + (Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja)
			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	10%	20%	40%	60%	80%	90%	100%	Jumlah Rencana Aksi Bupati yang didukung oleh Hasil Riset dan Inovasi (Naskah Kebijakan dan lain lain) / Jumlah Rencana Aksi Bupati x 100%

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja	24,41 Poin	24,5 Poin	24,59 Poin	24,68 Poin	24,77 Poin	24,86 Poin	24,95 Poin	Hasil Perhitungan AKIP Pemda dari Kemenpan
		Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Riset yang masuk dalam jurnal terakreditasi	N/A	4%	8%	12%	16%	20%	24%	Jumlah Hasil Riset yang masuk ke dalam jurnal terakreditasi (Sinta, dll)/ Jumlah total Hasil Riset yang dilaksanakan x 100%
			Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	26.45%	28.57%	28.85%	29.09%	29.31%	29.51%	29.69 %	Jumlah Inovasi yang diinput ke dalam IID Kemendagri / Jumlah Inovasi aktif yang terverfikasi dalam sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Bandung x 100%

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

3.2 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Dalam rangka menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan yang lebih terarah, Visi dan Misi pembangunan yang telah dirumuskan serta telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan perlu untuk dijabarkan lebih lanjut ke dalam Strategi dan Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang memungkinkan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan Bapperida Kabupaten Bandung guna mencapai visi dan misi Bupati terpilih adalah dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung misi 3 yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel". Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Bandung yang disinkronisasikan dengan kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung. Berdasarkan strategi tersebut dibutuhkan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga strategi menjadi lebih terfokus maka dibuat penahapan pembangunan Bapperida Kabupaten Bandung selama 5 (lima) tahun sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan landasan kualitas aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	Akselerasi kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	Ekspansi kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	Pemantapan kualitas kapabilitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
Penguatan landasan penerapan kelembagaan dengan prinsip *good and clean governance*	Peningkatan penerapan kelembagaan dengan prinsip *good and clean governance*	Akselerasi penerapan kelembagaan dengan prinsip *good and clean governance*	Ekspansi penerapan kelembagaan dengan prinsip *good and clean governance*	Pemantapan penerapan kelembagaan dengan prinsip *good and clean governance*
Penguatan landasan penerapan Satu Data Dalam untuk menghasilkan data berkualitas (*data-driven decision making*)	Peningkatan penerapan Satu Data Dalam untuk menghasilkan data berkualitas (*data-driven decision making*)	Akselerasi penerapan Satu Data Dalam untuk menghasilkan data berkualitas (*data-driven decision making*)	Ekspansi penerapan Satu Data Dalam untuk menghasilkan data berkualitas (*data-driven decision making*)	Pemantapan penerapan Satu Data Dalam untuk menghasilkan data berkualitas (*data-driven decision making*)
Penguatan landasan validitas dan reliabilitas data pembangunan	Peningkatan validitas dan reliabilitas data pembangunan	Akselerasi validitas dan reliabilitas data pembangunan	Ekspansi validitas dan reliabilitas data pembangunan	Pemantapan validitas dan reliabilitas data pembangunan
Penguatan landasan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan	Menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan	Menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan	Menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan	Menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Peningkatan penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan	Peningkatan penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan	Akselerasi penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan	Ekspansi penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan	Pemantapan penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan landasan pengembangan pendanaan kreatif dalam pembangunan daerah	Peningkatan pendanaan kreatif dalam pembangunan daerah	Akselerasi pengembangan pendanaan kreatif dalam pembangunan daerah	Ekspansi pengembangan pendanaan kreatif dalam pembangunan daerah	Pemantapan pengembangan pendanaan kreatif dalam pembangunan daerah
Peningkatan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan berbasis fakta	Peningkatan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan berbasis fakta	Akselerasi pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan berbasis fakta	Ekspansi pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan berbasis fakta	Pemantapan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan berbasis fakta
Penguatan landasan perencanaan yang bersinergi dan sinkron berdasarkan riset dan inovasi dengan Perangkat daerah	Peningkatan perencanaan yang bersinergi dan sinkron berdasarkan riset dan inovasi dengan Perangkat daerah	Akselerasi perencanaan yang bersinergi dan sinkron berdasarkan riset dan inovasi dengan Perangkat daerah	Ekspansi perencanaan yang bersinergi dan sinkron berdasarkan riset dan inovasi dengan Perangkat daerah	Pemantapan perencanaan yang bersinergi dan sinkron berdasarkan riset dan inovasi dengan Perangkat daerah
Penguatan landasan peran riset dan inovasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Peningkatan peran riset dan inovasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Akselerasi peran riset dan inovasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Ekspansi peran riset dan inovasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	Pemantapan peran riset dan inovasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah
Penguatan landasan kerjasama kelitbangan berbasis potensi daerah dan prioritas pembangunan daerah	Peningkatan kerjasama kelitbangan berbasis potensi daerah dan prioritas pembangunan daerah	Akselerasi kerjasama kelitbangan berbasis potensi daerah dan prioritas pembangunan daerah	Ekspansi kerjasama kelitbangan berbasis potensi daerah dan prioritas pembangunan daerah	Pemantapan kerjasama kelitbangan berbasis potensi daerah dan prioritas pembangunan daerah

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

3.3 Penyajian Lokus Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bahwa Bapperida Kabupaten Bandung memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta riset dan inovasi. Berkaitan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Bandung tidak memiliki lokus yang spesifik tetapi secara umum dilakukan di Kabupaten Bandung.

3.4 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan yang disusun oleh Bapperida Kabupaten Bandung guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapperida selama 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029 harus selaras dengan strategi dan arah kebijakan yang tertera dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung. Berikut ini merupakan arah kebijakan Renstra Bapperida Kabupaten Bandung sesuai dengan arah kebijakan RPJMD:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya sistem birokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Sinkronisasi substansi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah	Menyusun arsitektur kinerja pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan	
			Peningkatan penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan	
			Peningkatan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan berbasis fakta	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	
			Peningkatan kelembagaan yang menerapkan prinsip *good and clean governance*	
			Mengoptimalkan penerapan Satu Data Dalam untuk menghasilkan data berkualitas (*data-driven decision making*)	
			Peningkatan validitas dan reliabilitas data pembangunan	
		Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan optimalisasi tata kelola pengelolaan pendapatan daerah	Mengembangkan pendanaan kreatif dalam pembangunan daerah	
		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung pembangunan inklusif	Peningkatan sinergi dan sinkronisasi perencanaan berdasarkan riset dan inovasi dengan Perangkat daerah	
		Penguatan kelembagaan dan regulasi serta keterbukaan informasi berdasarkan riset dan inovasi daerah	Peningkatan peran riset dan inovasi dalam perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah	
			Penguatan kerjasama kelitbangan berbasis potensi daerah dan prioritas pembangunan daerah	

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

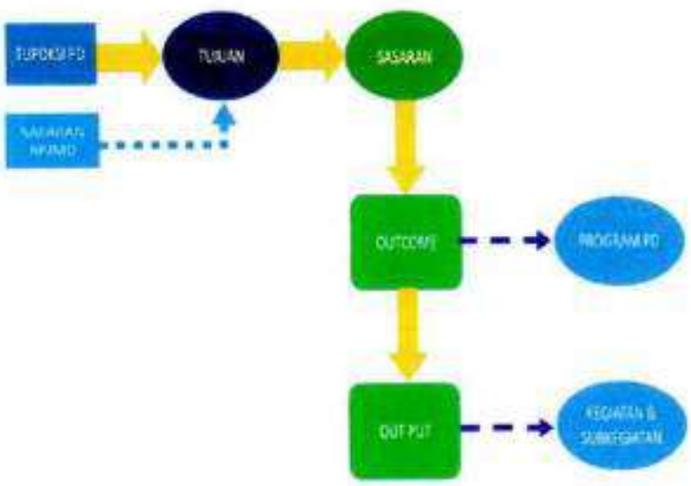
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bapperida yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Bapperida yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Kebijakan dan strategi arah kebijakan ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Bandung. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Bapperida Kabupaten Bandung. Keterkaitan antara program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra dengan dokumen RPJMD disajikan pada diagram di bawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Adapun rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)		IPPD Komponen versi 2023 berdasarkan aturan Bappenas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perhitungan IPPN dengan Definisi Operasional : (Komponen Sinergi) + (Komponen Kualitas Perencanaan) + (Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja)
					Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		Jumlah Rencana Aksi Bupati yang didukung oleh Hasil Riset dan Inovasi (Naskah Kebijakan dan lain lain) / Jumlah Rencana Aksi Bupati x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
		Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah			Indeks SAKIP komponen Perencanaan Kinerja		Hasil Perhitungan AKIP Pemda dari Kemenpan
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Terlaksanannya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Statistik Sektoral Daerah	Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Statistik Sektoral Daerah	Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun x100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun x100%
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Tersedianya Barang cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
							Penunjang Urusan PD yang harus disusun x100%
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
							Daerah yang harus dipenuhi x100%
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan
				Terlaksananya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Barang Milik Daerah / Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik x100%
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Indikator kinerja program RKPD yang selaras dengan RPJMD / Jumlah Indikator Kinerja Program pada RPJMD x 100%
					Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		Jumlah Indikator Kinerja Program Renstra dengan RPJMD / Jumlah Indikator Kinerja Program pada RPJMD x 100%
				Meningkatnya Keselarasan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan /total dokumen perencanaan pembangunan daerah x 100%
					Persentase berita acara yang disahkan		Jumlah berita acara yang disahkan/total jumlah berita acara x 100%
				Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)
				Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
				Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
				Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
				Ditetapkannya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Koordinasi Penyusunan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
				Meningkatnya Kualitas Analisis Data dan Informasi Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang harus ada x 100 %
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
				Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
				Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah dengan realisasi kinerja baik (nilai capaian kinerja tinggi (76-90) dan sangat tinggi (91-100))/ jumlah total PD
				Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
				Meningkatnya Transparansi dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Laporan/dokumen SIPD yang dilaksanakan	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen SIPD/jumlah total dokumen SIPD x 100%
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola
				Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota	di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Subkegiatan yang direncanakan dalam Renja (Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) / Jumlah Subkegiatan yang direncanakan dalam RKPD (Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) x 100%
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		Jumlah Jumlah Subkegiatan yang direncanakan dalam Renja (Lingkup bidang Perekonomian dan SDA) / Jumlah Subkegiatan yang direncanakan dalam RKPD (Lingkup bidang Perekonomian dan SDA) x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Subkegiatan yang direncanakan dalam Renja (Lingkup Lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan) / Jumlah Subkegiatan yang direncanakan dalam RKPD (Lingkup Lingkup bidang Infrastruktur dan kewilayahan) x 100%
				Meningkatnya keselarasan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen yang selaras antar RKPD dan Renja PD (Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) / Jumlah PD (Lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) x 100%
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Meningkatnya kesclarasan dokumen	Persentase dokumen Renja Perangkat	Koordinasi Perencanaan Bidang	Jumlah Dokumen yang selaras antara RKPD dengan Renja PD

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Renja Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA	Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA	Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	(Lingkup bidang Perekonomian dan SDA) / Jumlah PD (Lingkup bidang Perekonomian dan SDA) x 100%
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Meningkatnya keselarasan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Infraswil dan Kewilayahan	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Infraswil dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen yang selaras antara RKPD dengan Renja PD (Lingkup bidang Infraswil dan Kewilayahan) / Jumlah PD (Lingkup bidang Infraswil dan Kewilayahan) x 100%
				Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
				Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
				Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
		Meningkatnya kualitas hasil riset dan inovasi yang mendukung perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Persentase Hasil Riset yang masuk dalam jurnal terakreditasi		Jumlah Hasil Riset yang masuk ke dalam jurnal terakreditasi (Sinta, dll)/ Jumlah total Hasil Riset yang dilaksanakan x 100%
					Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan		Jumlah Inovasi yang diinput ke dalam IID Kemendagri / Jumlah Inovasi aktif yang terverifikasi dalam sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Bandung x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Inovasi yang diinput ke dalam IID Kemendagri / Jumlah Inovasi aktif yang terverifikasi dalam sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Bandung x 100%
			Meningkatnya Riset yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		Persentase Riset yang tersedia dalam dokumen Perencanaan		Jumlah Riset yang masuk dalam Dokumen Perencanaan / Jumlah Riset yang ada dalam peta jalan x 100%
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		Jumlah Fasilitasi, Pembinaan, Bimtek dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi berdasarkan kebutuhan yang dilaksanakan /Jumlah Fasilitasi, Pembinaan, Bimtek dan Supervisi yang direncanakan x 100%

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Meningkatnya peran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Riset yang masuk dalam Dokumen Perencanaan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang masuk dalam Dokumen Perencanaan
				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian,	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan,	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				pengembangan, pengkajian, dan penerapan	di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	pengkajian, dan penerapan	penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
				Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
				Terlaksanarya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah		bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
				Meningkatnya jumlah Invensi dan Inovasi	Jumlah inovasi aktif yang terverifikasi dalam sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Bandung	Invensi dan Inovasi	Jumlah inovasi aktif yang terverifikasi dalam sistem Inovasi Daerah (SIDA) di Kabupaten Bandung
				Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerjasama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi
				Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembanganRiset dan Inovasi di daerah berdasarkan	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembanganRiset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Ket.
				Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

Untuk rincian program, kegiatan dan subkegiatan serta skema pendanaan Bapperida Kabupaten Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				27,700,201,200		27,700,201,200		27,700,201,200		28,700,201,200		28,700,201,200	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	- 83,64 Poin - 50,26 Poin	- 83,74 Poin - 50,36 Poin	19,769,731,000	- 83,79 Poin - 50,41 Poin	19,769,731,000	- 83,84 Poin - 50,46 Poin	19,769,731,000	- 83,89 Poin - 50,51 Poin	19,769,731,000	- 83,94 Poin - 50,56 Poin	19,769,731,000	S.3.1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Bapperida	84,5 Poin	84,60 Poin	240,000,000	84,65 Poin	240,000,000	84,70 Poin	240,000,000	84,75 Poin	240,000,000	84,80 Poin	240,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	5,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	0	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Statistik Sektoral Daerah	Statistik Sektoral Daerah												
Pelaksansan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	86 Data	20,000,000	92 Data	20,000,000	92 Data	20,000,000	92 Data	20,000,000	92 Data	20,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	15,201,373,000	100%	15,201,373,000	100%	15,201,373,000	100%	15,201,373,000	100%	15,201,373,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	51 Orang	15,135,373,000	51 Orang	15,135,373,000	51 Orang	15,135,373,000	51 Orang	15,135,373,000	51 Orang	15,135,373,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	11,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	10,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	12 Laporan	15,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi	100%	100%	372,000,000	100%	372,000,000	100%	372,000,000	100%	372,000,000	100%	372,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kepegawaian yang tepat waktu												
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	42,000,000	1 Paket	42,000,000	1 Paket	42,000,000	1 Paket	42,000,000	1 Paket	42,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	70 Orang	70 Orang	300,000,000	70 Orang	300,000,000	70 Orang	300,000,000	70 Orang	300,000,000	70 Orang	300,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	676,500,000	100%	676,500,000	100%	676,500,000	100%	676,500,000	100%	676,500,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	20,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	351,500,000	1 Paket	351,500,000	1 Paket	351,500,000	1 Paket	351,500,000	1 Paket	351,500,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,000,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	150,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Disediakan	0	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	30,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2,690,000,000	100%	2,690,000,000	100%	2,690,000,000	100%	2,690,000,000	100%	2,690,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	305,000,000	12 Laporan	305,000,000	12 Laporan	305,000,000	12 Laporan	305,000,000	12 Laporan	305,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,380,000,000	12 Laporan	2,380,000,000	12 Laporan	2,380,000,000	12 Laporan	2,380,000,000	12 Laporan	2,380,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	100%	489,858,000	100%	489,858,000	100%	489,858,000	100%	489,858,000	100%	489,858,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	0	13 Unit	50,000,000	13 Unit	50,000,000	13 Unit	50,000,000	13 Unit	50,000,000	13 Unit	50,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	60,000,000	20 Unit	60,000,000	20 Unit	60,000,000	20 Unit	60,000,000	20 Unit	60,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	190,000,000	1 Unit	190,000,000	1 Unit	190,000,000	1 Unit	190,000,000	1 Unit	190,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	89,858,000	1 Unit	89,858,000	1 Unit	89,858,000	1 Unit	89,858,000	1 Unit	89,858,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR PERENCANAAN													
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD - Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	- 100% - 100%	- 91% - 91%	2,760,090,200	- 92% - 92%	2,760,090,200	- 93% - 93%	2,760,090,200	- 94% - 94%	3,010,090,200	- 95% - 95%	3,010,090,200	S.3.1; TPB 8; TPB 9
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	- Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah - Persentase berita acara yang disahkan	- 100% - 100%	- 100% - 100%	1,526,231,000	- 100% - 100%	1,526,231,000	- 100% - 100%	1,526,231,000	- 100% - 100%	1,626,231,000	- 100% - 100%	1,626,231,000	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	273,314,000	2 Dokumen	273,314,000	2 Dokumen	273,314,000	2 Dokumen	273,314,000	2 Dokumen	273,314,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	114,343,000	2 Dokumen	114,343,000	2 Dokumen	114,343,000	2 Dokumen	114,343,000	2 Dokumen	114,343,000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	1 Berita Acara	250,000,000	1 Berita Acara	250,000,000	1 Berita Acara	250,000,000	1 Berita Acara	250,000,000	1 Berita Acara	250,000,000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	200,000,000	1 Berita Acara	200,000,000	1 Berita Acara	200,000,000	1 Berita Acara	200,000,000	1 Berita Acara	200,000,000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	420,657,000	1 Berita Acara	420,657,000	1 Berita Acara	420,657,000	1 Berita Acara	420,657,000	1 Berita Acara	420,657,000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	2 Dokumen	2 Dokumen	267,917,000	2 Dokumen	267,917,000	2 Dokumen	267,917,000	2 Dokumen	367,917,000	2 Dokumen	367,917,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)												
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	541,513,000	100%	541,513,000	100%	541,513,000	100%	566,513,000	100%	566,513,000	TPB 8; TPB 9
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	146,200,000	1 Dokumen	146,200,000	1 Dokumen	146,200,000	1 Dokumen	171,200,000	1 Dokumen	171,200,000	TPB 8; TPB 9
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	68 Orang	68 Orang	265,542,000	68 Orang	265,542,000	68 Orang	265,542,000	68 Orang	265,542,000	68 Orang	265,542,000	TPB 8; TPB 9

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 Buku	2 Buku	129,771,000	2 Buku	129,771,000	2 Buku	129,771,000	2 Buku	129,771,000	2 Buku	129,771,000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	100%	96,30%	514,200,000	96,80%	514,200,000	97,30%	514,200,000	97,80%	564,200,000	98,30%	564,200,000	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	231,200,000	1 Laporan	231,200,000	1 Laporan	231,200,000	1 Laporan	231,200,000	1 Laporan	231,200,000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	2 Laporan	283,000,000	2 Laporan	283,000,000	2 Laporan	283,000,000	2 Laporan	333,000,000	2 Laporan	333,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Laporan/dokumen SIPD yang dilaksanakan	100%	100%	178,146,200	100%	178,146,200	100%	178,146,200	100%	253,146,200	100%	253,146,200	
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	N/A	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen -	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota	1 Dokumen	2 Dokumen	128,146,200	2 Dokumen	128,146,200	2 Dokumen	128,146,200	2 Dokumen	128,146,200	2 Dokumen	128,146,200	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA - Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	- 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100%	2,470,380,000	- 100% - 100% - 100%	2,470,380,000	- 100% - 100% - 100%	2,470,380,000	- 100% - 100% - 100%	3,220,380,000	- 100% - 100% - 100%	3,220,380,000	S.1.4; S.3.1
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	824,460,000	100%	824,460,000	100%	824,460,000	100%	1,074,460,000	100%	1,074,460,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	325,000,000	2 Dokumen	325,000,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	1 Laporan	118,500,000	1 Laporan	118,500,000	1 Laporan	118,500,000	1 Laporan	118,500,000	1 Laporan	118,500,000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	97,500,000	1 Laporan	97,500,000	1 Laporan	97,500,000	1 Laporan	97,500,000	1 Laporan	97,500,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	2 Dokumen	190,960,000	2 Dokumen	190,960,000	2 Dokumen	190,960,000	2 Dokumen	315,960,000	2 Dokumen	315,960,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	N/A	1 Laporan	122,500,000	1 Laporan	122,500,000	1 Laporan	122,500,000	1 Laporan	122,500,000	1 Laporan	122,500,000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	N/A	1 Laporan	95,000,000	1 Laporan	95,000,000	1 Laporan	95,000,000	1 Laporan	95,000,000	1 Laporan	95,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bidang Pembangunan Manusia	Daerah Bidang Pembangunan Manusia												
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	802,960,000	100%	802,960,000	100%	802,960,000	100%	1,052,960,000	100%	1,052,960,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	2 Dokumen	109,000,000	2 Dokumen	109,000,000	2 Dokumen	109,000,000	2 Dokumen	234,000,000	2 Dokumen	234,000,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	1 Laporan	161,439,000	1 Laporan	161,439,000	1 Laporan	161,439,000	1 Laporan	161,439,000	1 Laporan	161,439,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	1 Laporan	146,640,000	1 Laporan	146,640,000	1 Laporan	146,640,000	1 Laporan	146,640,000	1 Laporan	146,640,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	2 Dokumen	109,000,000	2	109,000,000	2	109,000,000	2	234,000,000	2	234,000,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	1 Laporan	127,541,000	1	127,541,000	1	127,541,000	1	127,541,000	1	127,541,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	1 Laporan	149,340,000	1	149,340,000	1	149,340,000	1	149,340,000	1	149,340,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan RKPD bidang Infraswil dan Kewilayahan	100%	100%	842,960,000	100%	842,960,000	100%	842,960,000	100%	1,092,960,000	100%	1,092,960,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	2 Dokumen	165,980,000	2 Dokumen	165,980,000	2 Dokumen	165,980,000	2 Dokumen	290,980,000	2 Dokumen	290,980,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	1 Laporan	162,430,000	1 Laporan	162,430,000	1 Laporan	162,430,000	1 Laporan	162,430,000	1 Laporan	162,430,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	1 Dokumen	2 Dokumen	165,980,000	2 Dokumen	165,980,000	2 Dokumen	165,980,000	2 Dokumen	290,980,000	2 Dokumen	290,980,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)												
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	N/A	1 Laporan	123,000,000	1 Laporan	123,000,000	1 Laporan	123,000,000	1 Laporan	123,000,000	1 Laporan	123,000,000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	N/A	1 Laporan	125,570,000	1 Laporan	125,570,000	1 Laporan	125,570,000	1 Laporan	125,570,000	1 Laporan	125,570,000	
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	a. Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan b. Persentase Riset yang tersedia dalam dokumen Perencanaan c. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	a. 26,45% b. N/A c. 100%	a. 28,85% b. 75% c. 100%	2,700,000,000	a. 29,09% b. 81% c. 100%	2,700,000,000	a. 29,31% b. 88% c. 100%	2,700,000,000	a. 29,51% b. 94% c. 100%	2,700,000,000	a. 29,69% b. 94% c. 100%	2,700,000,000	S.3.1
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah riset yang masuk dalam dokumen Perencanaan	N/A	12 Riset	1,050,000,000	13 Riset	1,050,000,000	14 Riset	1,050,000,000	15 Riset	1,050,000,000	16 Riset	1,050,000,000	
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	N/A	1 Naskah	200,000,000	1 Naskah	200,000,000	1 Naskah	200,000,000	1 Naskah	200,000,000	1 Naskah	200,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	N/A	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	N/A	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan,	N/A	1 Pelatihan	250,000,000	1 Pelatihan	250,000,000	1 Pelatihan	250,000,000	1 Pelatihan	250,000,000	1 Pelatihan	250,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	pengkajian, dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan												
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	N/A	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	
Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi aktif yang terverifikasi dalam sistem Inovasi Daerah	242 inovasi	260 Inovasi	1,650,000,000	275 Inovasi	1,650,000,000	290 Inovasi	1,650,000,000	305 Inovasi	1,650,000,000	320 Inovasi	1,650,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(SIDA) di Kabupaten Bandung												
Bimbingan teknis dan supervisi, kerjasama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	N/A	1 Pelatihan	250,000,000	1 Pelatihan	250,000,000	1 Pelatihan	250,000,000	1 Pelatihan	250,000,000	1 Pelatihan	250,000,000	
Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	N/A	1 Naskah	200,000,000	1 Naskah	200,000,000	1 Naskah	200,000,000	1 Naskah	200,000,000	1 Naskah	200,000,000	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	N/A	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	N/A	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
apresiasi prestasi Inovasi													
Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	N/A	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	N/A	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	N/A	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output:	Indikator Outcome/ Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	N/A	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	200,000,000	

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung 2025

Keterangan:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH : Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien

S.1.4 = Program yang Mendukung Sasaran KDH : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

TPB 8 = Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

TPB 9 = Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Industri, Inovasi dan Infrastruktur

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kabupaten Bandung didorong oleh pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan *cascading* kinerja RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
3	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	R 29
		Meningkatnya riset yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	R 29
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	R 29
			Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	R 29

No	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	R 29
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	R 29
			Bimbingan teknis dan supervisi, kerjasama, serta kemitraan invensi dan inovasi	R 29
			Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	R 29
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	R 29

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025

Keterangan:

R 29 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati : Membentuk Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKU Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bapperida Kabupaten Bandung pada periode 2025–2029, diperlukan indikator yang terukur, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. IKU PD tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur kinerja, tetapi juga sebagai alat kendali strategis untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan urusan perencanaan, riset dan inovasi daerah selaras dengan visi dan misi daerah.

Secara umum, indikator kinerja utama Bapperida Kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Poin	79	83,2	85,7	88	91	93,5	IPPD Komponen versi 2023 berdasarkan aturan Bappenas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perhitungan IPPN dengan Definisi Operasional : (Komponen Sinergi) + (Komponen Kualitas Perencanaan) + (Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja)
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	20	40	60	80	90	100	Jumlah Rencana Aksi Bupati yang didukung oleh Hasil Riset dan Inovasi (Naskah Kebijakan dan lain lain) / Jumlah Rencana Aksi Bupati x 100%

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Adapun indikator kinerja kunci (IKK) yang terdapat dalam dokumen RPJMD yang menjadi kewenangan Bapperida Kabupaten Bandung dalam urusan perencanaan serta riset dan inovasi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Poin	79	83,2	85,7	88	91	93,5	IPPD Komponen versi 2023 berdasarkan aturan Bappenas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perhitungan IPPN dengan Definisi Operasional : (Komponen Sinergi) + (Komponen Kualitas Perencanaan) + (Komponen Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja)
2	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	20	40	60	80	90	100	Jumlah Rencana Aksi Bupati yang didukung oleh Hasil Riset dan Inovasi (Naskah Kebijakan dan lain lain) / Jumlah Rencana Aksi Bupati x 100%

Sumber: Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya global untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. TPB mencakup berbagai dimensi seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadaan sosial. Dalam mencapai tujuan ini, terdapat 17 tujuan utama yang harus dipenuhi, antara lain penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan terhadap ekosistem darat dan laut. Bapperida Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke -8, yaitu: "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" serta TPB ke-9 yaitu: " Industri, Inovasi dan Infrastruktur". Tujuan tersebut sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida dalam penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan dan inovasi daerah.

Keterkaitan TPB 9 dengan TPB 8, yang berfokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, sangat jelas, karena pembangunan infrastruktur dan industri menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kedua TPB tersebut diterjemahkan dalam sasaran global dan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Bandung yaitu :

a. Sasaran global: mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang;
b. Sasaran global: Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto

Untuk mengatur ketercapaian tersebut, terdapat indikator yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Bandung yaitu:

8.1.1 Laju pertumbuhan PDRB per kapita

8.1.1.(a) PDB perkapita

9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Rencana penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Bapperida tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Indikator TPB/SDGs

No	Tujuan/ *Goals*	Indikator		Satuan	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	TPB 8 (Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi)	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Persen	5,08	5,77	6,23	6,48	6,79	5,98	
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Juta Rupiah	47,17	50,98	55,46	60,56	66,45	72,03	
2	TPB 9 (INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR)	9.1.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Persen	52,37	52,33	52,29	52,24	52,19	52,13	
		9.1.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Persen	6,23	6,49	6,95	7,40	7,85	7,85	

Sumber: RAD TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi, tujuaan, sasaran hingga menetapkan prioritas pembangunan juga menggunakan pendekatan tematik dengan mengusung beberapa tema pembangunan. Pengusungan konsep tematik ini bertujuan sebagai bentuk percepatan pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025-2029 yang Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya Bapperida sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan juga memiliki fungsi koordinasi. Dalam menunjang percepatan pembangunan melalui konsep pembangunan tematik, Bapperida Kabupaten Bandung secara umum menunjang terhadap semua subtema aksi tematik Pembangunan di Kabupaten Bandung sebagai pendamping koordinasi dari berjalannya aksi tematik pembangunan tersebut dalam rangka mewujudkan pembangunan Tematik di Kabupaten Bandung. Bapperida memiliki Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat memastikan perencanaan pembangunan tematik yang dirancang berjalan sebagaimana mestinya.

Selain sebagai pendamping koordinasi perencanaan, Bapperida Kabupaten Bandung mendukung secara spesifik dalam subtema aksi tematik pembangunan yang diantaranya yaitu aksi tematik Peningkatan Ketahanan Pangan, Kawasan Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bandung dan Sumber Daya Manusia Bedas.

a. Aksi Tematik Peningkatan Ketahanan Pangan

Pada aksi tematik Peningkatan Ketahanan Pangan, permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya pemanfaatan pangan di Kabupaten Bandung sehingga Bapperida Kabupaten Bandung mencoba menginisiasi pendekatan Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas yang mengintegrasikan proses produksi, distribusi, dan konsumsi ke dalam suatu ekosistem pangan yang inklusif serta berkelanjutan melalui penguatan pemanfaatan inovasi teknologi sehingga dapat mewujudkan program pembangunan simpul pangan lokal berbasis komunitas melalui efisiensi inovasi dan keterhubungan antar pelaku. Program Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan bagian dari urusan penelitian dan pengembangan diharapkan mampu

menghasilkan inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung dalam mewujudkan aksi tematik Peningkatan Ketahanan Pangan tersebut.

b. Aksi Tematik Kawasan Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bandung

Lain halnya pada aksi tematik Kawasan Pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bandung ini memfokuskan intervensi pembangunan pada isu-isu strategis di Ibukota Kabupaten Bandung, di Kecamatan Soreang yang berfokus pada "Mewujudkan Kawasan Perkotaan Soreang Sebagai Ibukota Kabupaten Bandung yang Bersih, Nyaman, Tertib, Aman, dan Berkembang Melalui Penguatan Fungsi Kawasan Serta Penataan Ruang Yang Berkelanjutan". Salah satu permasalahan yang muncul yaitu belum optimalnya implementasi Perda dan Perbup terkait Tata Ruang dan belum optimalnya pengendalian perizinan. Salah satu *Critical Succes Factor* (CSF) untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penguatan regulasi dan sistem pengendalian perizinan berbasis digital dan spasial. Pendekatan ini selaras dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan keterkaitan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program tematik perencanaan pengembangan kota sesuai dengan RDTR Soreang serta optimalisasi pengawasan dan pengendalian ruang dapat mendukung terwujudnya CSF tersebut. Dalam mewujudkan percepatan pembangunan tersebut Bapperida Kabupaten Bandung melaksanakan pengawasan dan penegakan regulasi pemanfaatan dan pengendalian ruang kota melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Permasalahan lain dalam mewujudkan kawasan pengembangan Ibu Kota Kabupaten Bandung yaitu kurang tertatanya kawasan ruang publik. Hal ini dapat diatasi jika pengembangan ruang publik berbasis kebutuhan masyarakat bisa terwujud melalui pengembangan program tematik penegakan Perda/Perkada serta penataan kawasan ruang publik kota. Hal yang bisa diintervensi oleh Bapperida adalah dengan mengawal dan mendampingi dalam penegakkan serta pengawasan penataan ruang publik kota melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Aksi Tematik SDM Bedas

Subtema tematik ini memfokuskan intervensi pada pembangunan isu-isu strategis di bidang sosial. Sub tema ini mengarusutamakan

transformasi sosial melalui penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok sasaran prioritas. Salah satu subtema prioritas yang diangkat adalah kesejahteraan sosial melalui penanganan kemiskinan. Permasalahan yang muncul dalam pengembangan subtema tersebut adalah kemiskinan yang berlanjut akibat rendahnya akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal tersebut dapat diatasi jika terpadunya tata kelola penanggulangan kemiskinan bisa terwujud. Bapperida Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dapat melakukan integrasi dan koordinasi data pensasaran kemiskinan dari berbagai sumber serta pemutakhiran data pensasaran kemiskinan secara berkala dan partisipatif melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bapperida Kabupaten Bandung, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bapperida Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi masyarakat, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Bandung setiap tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman pada indikator sasaran, *outcome*, kegiatan dan *output* dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 harus dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berorientasi pada hasil (*result-oriented*), serta menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi.

Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman normatif sekaligus operasional bagi seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan dalam menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata yang terukur dan berkelanjutan. Pada pelaksanaannya harus berprinsip pada kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra Bapperida Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 harus selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Renstra yang disusun berdasarkan pendekatan berbasis kinerja (*performance-based planning*) yaitu fokus pada hasil (*outcome*) dan manfaat (*impact*) yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur dan target tahunan yang telah ditetapkan serta dituangkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (Renja) sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis;
3. Pelaksanaan Renstra harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta transparan dalam proses penyusunan, implementasi dan pelaporan;
4. Sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi (*Monev*) harus dijalankan secara berkala dan sistematis. Setiap pemangku urusan wajib menyampaikan laporan kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang kemudian akan dievaluasi untuk melihat efektivitas, kendala lapangan, serta peluang perbaikan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyesuaian strategi pelaksanaan pada tahun berikutnya melalui mekanisme perencanaan tahunan dan perubahan Renstra bila diperlukan;
5. Pelaksanaan Renstra ini harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, dinamika ekonomi global, serta perkembangan teknologi informasi harus direspons secara cepat dan tepat oleh Bapperida melalui kebijakan yang fleksibel namun tetap akuntabel;
6. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi aparatur, pembenahan sistem birokrasi

internal, serta penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik harus terus ditingkatkan.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah ini, pelaksanaan Renstra Bapperida Kabupaten Bandung diharapkan tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi benar-benar mendorong pencapaian hasil pembangunan yang nyata,terukur, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta perekonomian daerah secara luas.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam kaidah pelaksanaan Renstra disebutkan bahwa sistem pelaporan dan evaluasi harus dilaksanakan secara berkala dan sistematis. Pengendalian dan evaluasi pembangunan sangat penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program dan akuntabilitas penggunaan sumber daya. Proses ini harus dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan strategis dalam siklus manajemen pembangunan yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Bapperida Kabupaten Bandung berjalan sesuai dengan arah, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Pelaksanaan pengendalian mencakup *monitoring* (pemantauan), supervisi dan koordinasi antar pihak.

Fungsi pengendalian mencakup pemantauan pelaksanaan kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja, dan penggunaan anggaran. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui rapat koordinasi internal secara periodik, supervisi lapangan, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing urusan. Pengendalian juga diarahkan untuk mendeteksi lebih awal potensi permasalahan yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Bila diperlukan, tindakan korektif atau penyesuaian kebijakan dapat segera diambil, baik dalam bentuk rekomendasi perubahan strategi pelaksanaan, realokasi anggaran, maupun revisi terhadap target kinerja, peningkatan kapasitas kelembagaan serta tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan, termasuk dampak nyata yang dihasilkan terhadap masyarakat. Evaluasi dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme evaluasi triwulanan, tahunan, dan akhir periode Renstra. Proses ini mencakup evaluasi *input*, proses, *output*, dan *outcome* berdasarkan indikator kinerja utama (IKU). Hasil evaluasi menjadi dasar utama dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, baik dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan berikutnya. Selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada publik, DPRD, dan instansi pengawasan eksternal, serta sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan elektronik juga didorong agar proses evaluasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.

Soreang, 18 September 2025

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah,

Ttd

MARLAN

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah ASN BAPPERIDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan/Pangkat, dan Jenis Kelamin 23

Tabel 2.2 Hasil Rekonsiliasi Aset BAPPERIDA s/d Semester I Tahun 2025.... 24

Tabel 2.3 Data Kajian Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022-2024 26

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BAPPERIDA Kabupaten Bandung..... 27

Tabel 2.5 Capaian Indikator SDG's 2022-2024 30

Tabel 2.6 Evaluasi Capaian kinerja BAPPERIDA Tahhun 2021-2026..... 32

Tabel 2.7 Capaian Anggaran BAPPERIDA Tahun 2021-2024 67

Tabel 2.8 Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Bappenas 85

Tabel 2.9 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas RI dengan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 86

Tabel 2.10 Tujuan dan Sasaran Resntra BAPPEDA Provinsi Jawa Barat 88

Tabel 2.11 Sandingan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.. 88

Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 95

Tabel 2.13 Jumlah Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah..... 98

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.....102

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 105

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.....107

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 110

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan 145

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 177

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.....181

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 182

Tabel 4.6 Indikator TPB/SDGs 183

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPPERIDA 17

Gambar 2.2 *Cascading* Misi Pembangunan 3..... 90

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....109